

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Kajian Pada Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)

Nama : Erma Widya Lestari
NIM : 11040674202
Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : PMP-KN
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya
Pembimbing : Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc.

Abstrak

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi status hukum atas setiap peristiwa yang dialami oleh penduduknya, sehingga diperlukan penataan administrasi kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan. Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berisi tentang peristiwa kelahiran dan identitas seseorang sebagai bukti otentik pengakuan anak dari orang tua dengan perkawinan yang sah. Di Kota Surabaya, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah rendahnya partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran.

Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan Teori Tingkat Kesukarelaan Partisipasi Masyarakat oleh Dusseldorp yang membedakan beberapa tingkatan dalam partisipasi yaitu Partisipasi Spontan, Partisipasi Terinduksi, Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan, Partisipasi Tertekan oleh Sosial-Ekonomi, dan Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang ditentukan secara *Insidental* (kebertulan). Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif-kuantitatif dengan mengelompokkan karakteristik responden berdasarkan tingkat partisipasi yang diberikan responden yang kemudian divariasikan berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan, dan penghasilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran sebanyak 63% dilakukan oleh responden secara spontan atau atas dasar kesadaran diri sendiri; sebanyak 16% dilakukan secara terinduksi atau adanya pengaruh dan dorongan dari pihak lain; sebanyak 5% dilakukan karena adanya pengaruh kebiasaan atau adat dalam masyarakat baik nilai dan norma yang ada di masyarakat; sebanyak 8% dilakukan karena adanya pengaruh dari kehidupan sosial masyarakat dan keadaan ekonomi atau status ekonomi responden; dan sebanyak 8% dilakukan karena adanya rasa takut pada peraturan atau takut akan sanksi (denda) jika tidak mentaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan maka pada kelompok responden dengan partisipasi spontan dapat diketahui bahwa responden dalam kelompok ini didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA. Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta, dan menurut penghasilan didominasi oleh masyarakat (responden) yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 1.999.000,

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran

PUBLIC PARTICIPATION IN ADMINISTRATION OF POPULATION

(Study On Birth Certificate Management in the Department of Population and Civil Registration Surabaya)

Name : Erma Widya Lestari
NIM : 11040674202
Program of Study : S1 – Public Administration
Course : PMP-KN
Faculty : Social Science Faculty
The Institution Name : Surabaya State University
The Advicer of Lecture : Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc.

Abstract

As the State of Law, Indonesia has an obligation to protect the legal status of any events experienced by the population, so that the necessary arrangements on demographic administration. Population administration stipulated in Law number 23 of 2006 on Population Administration, which is then converted into Law number 24 of 2013 on the Amendment of Population Administration Policy. One form of population administration is the birth certificate. A birth certificate is a document that contains a population of a birth and a person's identity as an authentic proof of the recognition of children from parents with legal marriage. In the city of Surabaya, the population administration are still having some problems one of which is the lack of community participation in the management given birth certificates.

This thesis raises the issue of "How public participation in the management of a birth certificate in the Department of Population and Civil Registration Surabaya?". This study aims to measure and describe the community participation in the maintenance of a birth certificate in the Department of Population and Civil Registration Surabaya.

This research uses theory voluntary public participation rate by Dusseldorp in Turindra (2010:25) which distinguishes several levels of participation, namely participation Spontaneous, Induced Participation Participation depressed by habit, Depressed Participation by Socio-Economic, and Participation Depressed By Regulation. This research was conducted in the Department of Population and Civil Registration Surabaya. The method used was a descriptive study using a quantitative approach. The sample was of 100 respondents were determined Incidental (coincidence). Analysis of the data used is descriptive-quantitative data analysis by classifying characteristics of respondents based on their level of participation that respondents were then varied by level of education, type of education, and income

The results showed that community participation in the management of birth certificates as much as 63% of respondents spontaneously carried out by or on the basis of self-awareness; as much as 16% done because of induced or the influence and encouragement from others; as much as 5% because of the influence of habitual or customary in good society values and norms that exist in society; as much as 8% done because of the influence of social life and economic circumstances or economic status of respondents; and as much as 8% done because of the fear of regulation or fear of sanctions (fines) if it does not comply with applicable regulations. Furthermore, if viewed by background levels of education, occupation, income and then in the group of respondents with spontaneous participation can be seen that the respondents in this group is dominated by education level of respondents who have SMA / SMK / MA. Based on the type of work, dominated by the respondents) who work as private employees, and according to income is dominated by people (respondents) who have an income of Rp 1.000.000, - up to Rp 1.999 .000,-

Keywords : Public Participation, Population Administration, Birth Certificate

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 yang berbunyi “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Kondisi kependudukan di Indonesia mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Perkembangan yang terjadi dalam administrasi kependudukan meliputi perkembangan IPTEK yang terkait dengan kependudukan. Perkembangan penduduk juga menuntut tersedianya penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan yang tertib, aman, dan jujur. Hal ini dikarenakan kebutuhan penduduk yang semakin beragam seperti tersedianya akses administrasi kependudukan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan penataan dalam administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu hal yang *urgent*. Dalam bidang administrasi kependudukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 3 bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Lembaga/Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Sehingga hal ini mewajibkan setiap penduduk wajib melaporkan mengenai setiap peristiwa kependudukan yang dialami.

Implementasi penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, implementasi kebijakan administrasi kependudukan terdiri atas Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk terbagi atas 4 (empat) bagian dan Pencatatan Sipil terbagi atas sebelas bagian.

Dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan masih menuai permasalahan mulai dari struktur birokrasi, pelayanan yang rumit dan rawan korupsi atau

suap sehingga membuat seseorang sulit untuk mendapatkan dokumen kependudukannya hingga partisipasi yang diberikan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan.

Menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan, Pemerintah melakukan perubahan terhadap penataan administrasi kependudukan yakni dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan.

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pengurusan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen pencatatan kelahiran seseorang yang bersifat universal, berlaku seumur hidup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Akta kelahiran memiliki peran penting sebagai bukti kepastian hukum atas identitas seseorang serta sebagai dasar bagi negara untuk pedoman menyusun anggaran untuk kebijakan Pemerintah (baik di tingkat Pusat atau Daerah).

Di Kota Surabaya, dengan jumlah penduduk 2.852.892 jiwa penduduk (berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya per Desember 2014) menunjukkan bahwa Penduduk Surabaya yang sudah memiliki Akta Kelahiran sejumlah 1.372.737 jiwa penduduk dan yang belum memiliki Akta Kelahiran sejumlah 1.480.155 jiwa penduduk dengan jumlah akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya selama Januari-Desember 2014 sebanyak 61.056 kutipan akta kelahiran. Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Kota Surabaya, masih terkendala pada kurangnya sumber daya pendukung serta partisipasi masyarakat untuk mendukung terselenggaranya administrasi kependudukan yang aman, tertib dan jujur.

Setelah melakukan observasi awal terkait penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diketahui bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pengurusan akta kelahiran disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran sebagai identitas dan asal usul setiap penduduk. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Suwardiono selaku Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

“Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya masih belum berjalan dan terselenggara

sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen – dokumen kependudukan seperti pengurusan akta kelahiran. Untuk partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran, kesadaran masyarakat masih rendah dan biasanya masyarakat baru akan mengurus akta kelahiran jika mereka benar-benar membutuhkan akta kelahiran baik untuk persyaratan masuk sekolah ataupun untuk pekerjaan. Namun, Pemkot Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya telah menciptakan suatu inovasi untuk mempermudah pelayanan pengurusan akta kelahiran melalui Layanan e-Kios yang disediakan di setiap Kelurahan, sehingga masyarakat dapat mengurus akta kelahiran secara online melalui e-Kios” (wawancara tanggal 16 Februari 2015)

Berdasarkan kondisi penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Surabaya, maka peneliti ingin mengkaji tentang **“Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan (Kajian Pada Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada kondisi penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Surabaya maka rumusan permasalahan yang akan dikemukakan adalah **“Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya?”**

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengukur dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa terhadap administrasi kependudukan khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran

b. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi kajian-kajian tentang Administrasi Negara

khususnya tentang administrasi kependudukan (pengurusan akta kelahiran).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk memilih metode alternatif (solusi permasalahan) yang tepat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Surabaya

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat sebagai motivasi untuk berpartisipasi (ikut serta) dalam mensukseskan penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Surabaya, khususnya untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan tentang administrasi kependudukan (akta kelahiran).

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam Septiana (2013:25) adalah:

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Hal ini senada dengan pendapat Mubyarto (dalam Ndraha, 1990:105) tentang partisipasi masyarakat yang mengemukakan bahwa

“Partisipasi masyarakat adalah ketersediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan setiap individu”

Dari kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap program kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Partisipasi atau

keikutsertaan masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan setiap program-program kebijakan dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat.

2. Bentuk - Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein dalam Azhari (2011:42-43), bahwa ada delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan dari yang tertinggi hingga terendah yaitu :

1) *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat)

Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

2) *Delegated Power* (Pelimpahan Kekuasaan)

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu.

3) *Partnership* (Kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan.

4) *Placation* (Perujukan/Penentruman)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan.

5) *Consultation* (konsultasi)

Tipe ini mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi yang penuh dari masyarakat.

6) *Informing* (informasi)

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab, dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.

7) *Therapy* (terapi/penyembuhan)

Dengan berkedok ingin melibatkan peran serta

masyarakat dalam proses perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi.

8) *Manipulation* (manipulasi)

Tingkat partisipasi ini merupakan partisipasi yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat.

Hal ini senada dengan pandangan Goethert dalam Suciati (2006:40), yang membagi lima tingkat partisipasi yaitu :

1) *None*, artinya outsider semata-mata bertanggung jawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.

2) *Information or Indirect*, sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.

3) *Consultation*, outsider mendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat.

4) *Shared Control*, masyarakat dan outsider berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.

5) *Full Control*, masyarakat mendominasi dan outsider membantu ketika diperlukan.

3. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi Masyarakat

Dusseldorp dalam Turindra (2010:25), membedakan adanya beberapa tingkat kesukarelaan dalam partisipasi masyarakat. Adapun tingkat kesukarelaan tersebut sebagai berikut:

1) Partisipasi Spontan yaitu peran serta masyarakat yang tumbuh karena adanya motivasi intrinsik berupa adanya pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.

2) Partisipasi Terinduksi yaitu peran serta masyarakat yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, paksaan, ataupun dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.

- 3) Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan untuk memenuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperan serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.
- 4) Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial, menderita kerugian atau tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- 5) Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman atau sanksi dari peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam setiap program kegiatan yang ada di masyarakat. Faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan program kegiatan dan ada juga yang dapat menjadi penghambat keberhasilan kegiatan program masyarakat.

Menurut Slamet dalam Daviyanti (2013:383-384), ada dua faktor yang menjadi pendorong dan penghambat seseorang untuk berpartisipasi. Faktor utama yang mendukung adalah Kemauan, Kemampuan, dan Kesempatan. Sedangkan faktor penghambat dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

- 1) Faktor Internal
Faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, penghasilan, dan pekerjaan.
- 2) Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu seperti kepentingan kelompok, stakeholder yang merupakan Pemerintah Daerah, Pengurus Kecamatan/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Fasilitator, dan lainnya yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam berpartisipasi.

Dari faktor internal dan faktor eksternal tersebut, dapat dijabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi yaitu:

1. Usia
2. Jenis Kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan dan Penghasilan
5. Lamanya Tinggal

5. Motif Partisipasi Masyarakat

Seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu akan didasari adanya motif atau alasan yang menggerakannya. Begitu pula dengan keikutsertaan seseorang untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat akan dilandasi oleh motif tertentu seperti motif ekonomi, psikologi, agama. Menurut Billah yang dikutip Taher (1987:146-149) terdapat 5 motif yang menjadi dasar keikutsertaan masyarakat yaitu :

- 1) Motif Psikologis yaitu motif partisipasi yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu maupun kelompok
- 2) Motif Sosial yaitu motif yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat
- 3) Motif Keagamaan yaitu motif yang dipengaruhi oleh kepercayaan setiap individu atau kelompok
- 4) Motif Ekonomi yaitu motif yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang berbasis pada keuntungan dan kerugian yang akan didapat.
- 5) Motif Politik yaitu motif yang dipengaruhi oleh kekuatan politik yang mengutamakan pada kekuasaan

B. Tinjauan Tentang Administrasi Kependudukan

1. Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa :

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk;
- b. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil;
- c. Kegiatan penataan dan penertiban administrasi kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk masyarakat.

2. Akta Kelahiran

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pencatatan sipil yang didalamnya terdapat pengurusan dan pencatatan akta kelahiran. Definisi akta kelahiran menurut Septiana (2013:31)

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berlaku seumur hidup hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka untuk memperoleh kepastian terhadap kedudukan seseorang

Adapun bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang status atau kedudukan seseorang adalah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran. Maka akta kelahiran anak dari perkawinan yang sah membuktikan tentang hal sebagai berikut:

- 1) Data Lahir
 - a. Tempat Kelahiran
 - b. Hari dan tanggal kelahiran
 - c. Nama lengkap anak
 - d. Jenis kelamin
 - e. Nama orang tua (ayah dan ibu)
 - a) Hubungan anak dengan ayah dan ibu
 - b) Status kewarganegaraan orang tua (WNI/WNA)

- 2) Tanggal penerbitan akta kelahiran
- 3) Tanda tangan pejabat yang berwenang

Pengesahan berupa tanda tangan pejabat yang berwenang sebagai bukti penerbitan kutipan akta kelahiran. Dalam hal ini akta kelahiran yang telah diterbitkan 2 lembar yaitu 1 lembar untuk yang bersangkutan dan 1 lembar sebagai arsip untuk disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tujuan pembuatan akta kelahiran sebagai berikut :

- 1) Untuk pembuatan pasprt dan perjalanan ke luar negeri
- 2) Untuk pembuatan Akte Nikah atau Surat Nikah
- 3) Untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Untuk pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- 5) Untuk mengurus Hak-Hak bagi Ahli Waris berdasarkan hukum di Indonesia, masalah asuransi, tunjangan keluarga, bea siswa, dan dana pensiun.
- 6) Untuk pengurusan status kewarganegaraan.

Penerbitan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak anak. Sedangkan berdasarkan hak perlindungan anak, akta kelahiran memiliki arti penting bagi setiap penduduk yaitu sebagai bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak untuk mendapatkan haknya seperti hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak waris, dsb dan mencegah anak dari tindak kekerasan seperti adopsi ilegal, pemalsuan umur, dsb. Hal ini seperti dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*".

Sedangkan fungsi akta kelahiran bagi negara adalah sebagai dasar bagi Pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam membuat kebijakan, untuk mengetahui data anak guna penyusunan data statistik yang dapat dijadikan sebagai gambaran demografi, karakteristik penduduk suatu wilayah serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut UU No.23 Tahun 2006, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 4 jenis yaitu :

- 1) Akta Kelahiran Umum
- 2) Akta Kelahiran Terlambat (Rekomendasi).
- 3) Akta Kelahiran Istimewa
- 4) Akta Kelahiran Tambahan

Sedangkan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan maka akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terbagi atas 2 jenis yaitu :

- 1) Akta Kelahiran Tidak Terlambat (Daftar Pokok)

Akta kelahiran yang dicatatkan sebelum batas akhir pengurusan yaitu 60 hari sejak tanggal kelahiran

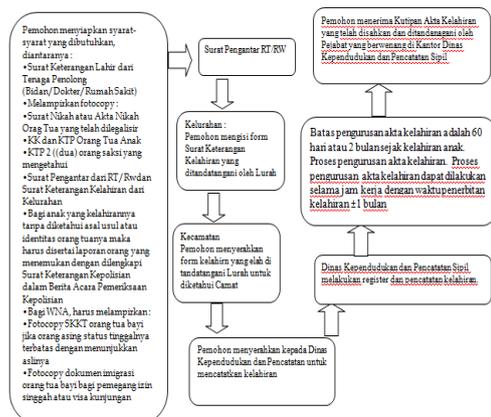
- 2) Akta Kelahiran Terlambat

Akta kelahiran yang dicatatkan melebihi batas waktu 60 hari (2 bulan) ketentuan pengurusan akta kelahiran. Pengurusan akta kelahiran terlambat akan dikenakan sanksi atau denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap keterlambatan.

Untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, dapat dilihat pada gambar alur pengurusan akta kelahiran di bawah ini:

Gambar 2.1

Alur Pengurusan Akta Kelahiran



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, 2014

Penelitian ini akan melihat partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil

menggunakan tingkat kesukarelaan partisipasi masyarakat oleh Dusseldorp dalam Turindra (2010:25) yang membedakan adanya beberapa tingkat kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi yaitu

1. Partisipasi Spontan
2. Partisipasi Terinduksi
3. Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan
4. Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi
5. Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan lokasi yang diambil adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Surabaya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah penduduk Kota Surabaya pemegang akta kelahiran berdasarkan usia pada tahun 2014 sebanyak 2.852.892 jiwa penduduk, Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan rumus Taro Yamane sebanyak 100 responden. Penentuan sampel dilakukan secara Insidental Sampling (kebetulan). Sampling Insidental adalah sampel kebetulan, teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2010:67).

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yaitu pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan instrumen penelitian yang dituangkan dalam kuesioner (angket). Dan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari berita administrasi kependudukan, laporan kependudukan, jurnal terkait partisipasi masyarakat dalam admisnitrasi kependudukan, dan dokumetasi atau arsip kependudukan Dispendukcapil Kota Surabaya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dengan mengelompokkan partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang kemudian divariasikan berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan. Data kuantitatif yang diperoleh kemudian dideskripsikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Adminsitrasi Kependudukan (Kajian Pada Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surabaya) ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner (angket) yang berisi sejumlah pernyataan untuk dijawab responden dan disebar kepada responden yang dipilih secara insidental (kebetulan).

Berdasarkan hasil penelitian, sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Pengelompokan responden berdasarkan karakteristik data responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lamanya tinggal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki – Laki	49	49%
Perempuan	51	51%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
≤ 17 Tahun	0	0%
18 – 34 Tahun	49	49%
35 – 51 Tahun	44	44%
52 – 68 Tahun	7	7%
≥ 68 Tahun	0	0%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD/MI	7	6%
SMP/MTs	12	12%
SMA/SMK/MA	56	56%
D3/S1/S2/S3	25	25%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
PNS/Pemerintah	6	6%
Pedagog	1	1%
Tenaga Medis (Dokter, Bidan, Perawat, dsb)	1	1%
Tenaga Pendidik (Guru, Dosen, dsb)	4	4%
Swasta	46	46%
Wiraswasta	14	14%
Lain- Lain (Ibu Rumah Tangga, Teknisi, SPG, SPB)	28	28%
Buruh / Tani.	0	0%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Jumlah	Persentase (%)
≤ Rp 999.000,-	13	13%
Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,-	33	33%
Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000,-	22	22%
≥ Rp 3.000.000,-	32	32%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Tinggal

Lamanya Tinggal	Jumlah	Persentase (%)
≤ 15 Tahun	30	30%
16 – 30 Tahun	38	38%
31 – 45 Tahun	23	23%
≥ 45Tahun	9	9%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Hasil kuesioner yang telah dientry atau dimasukkan ke dalam tabel frekuensi kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori tingkat kesukarelaan partisipasi masyarakat yang telah ditentukan selanjutnya dihitung pada setiap kategori. Perhitungan hasil kuesioner berdasarkan kelompok tingkat kesukarelaan partisipasi responden, selanjutnya dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Riduwan, 2010:88)

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase Kelompok Tingkat Kesukarelaan Partisipasi Responden

F : Jumlah Skor Kelompok Tingkat Kesukarelaan Partisipasi Responden

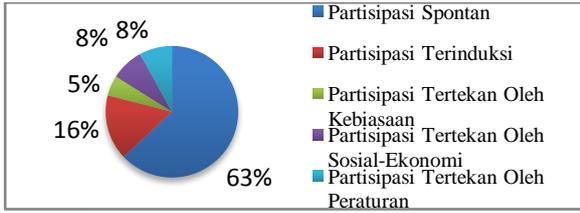
N : Jumlah Skor Total Kelompok Tingkat Kesukarelaan Partisipasi Responden

Perhitungan skor setiap kategori kelompok responden juga akan digunakan untuk mengukur dan menghitung skor akhir sehingga dapat dijadikan sebagai penentu kategori pada setiap variabel dalam bentuk persentase (%). Nilai persentase yang didapat kemudian dideskripsikan agar memudahkan pemahaman.

a. Proporsi Kelompok Responden Berdasarkan Tingkat Kesukarelaan Partisipasi

Untuk menghitung skor persentase setiap kategori tingkat partisipasi dapat dilakukan dengan cara mengkategorikan responden berdasarkan tingkat partisipasi yang telah diberikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini :

Gambar 4.2
Pengelompokan Data Responden
Berdasarkan Tingkat Kesukarelaan Partisipasi



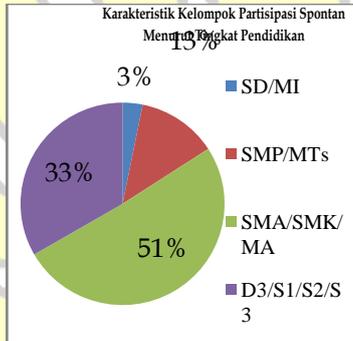
Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

b. Variasi Karakteristik Setiap Kelompok Tingkat Partisipasi

Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan variasi data pada masing-masing tingkat partisipasi. Variasi data akan dilihat berdasarkan pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan. Adapun deskripsi rinci sebagai berikut:

1. Karakteristik Kelompok Partisipasi Spontan

Gambar 4.3
Karakteristik Kelompok Partisipasi Spontan
Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Gambar 4.4
Karakteristik Kelompok Partisipasi Spontan
Menurut Jenis Pekerjaan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

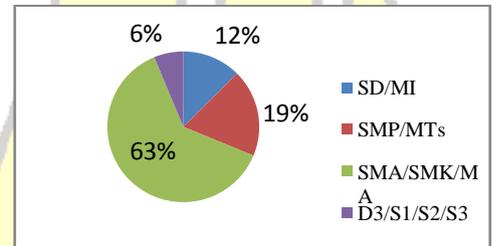
Gambar 4.5
Karakteristik Kelompok Partisipasi Spontan
Menurut Penghasilan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

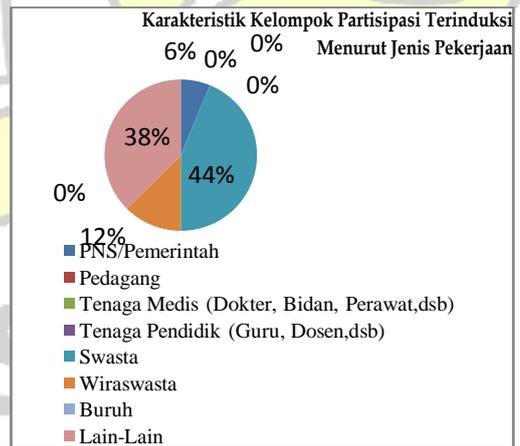
2. Karakteristik Kelompok Partisipasi Terinduksi

Gambar 4.6
Karakteristik Kelompok Partisipasi Terinduksi
Menurut Tingkat Pendidikan



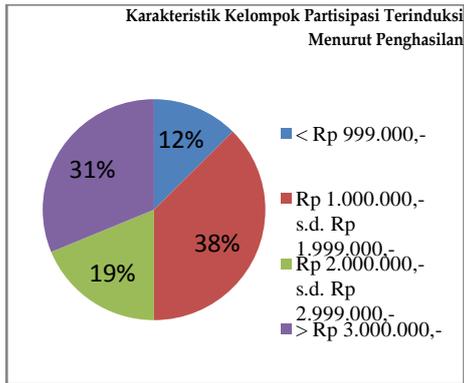
Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Gambar 4.7
Karakteristik Kelompok Partisipasi Terinduksi
Menurut Jenis Pekerjaan



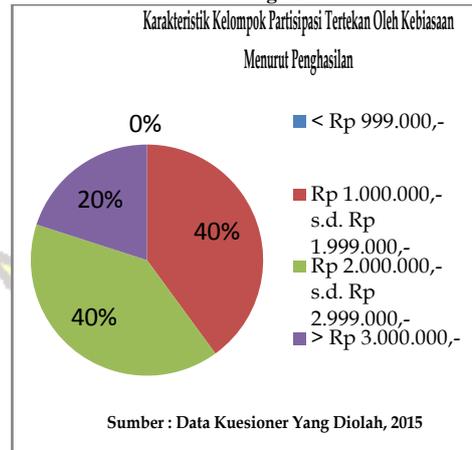
Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Gambar 4.8
Karakteristik Kelompok Partisipasi Terinduksi
Menurut Penghasilan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

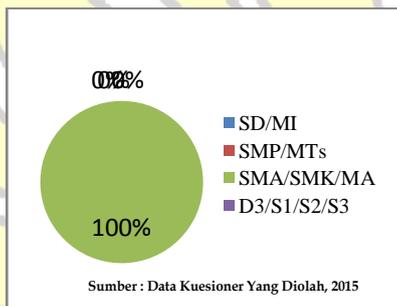
Gambar 4.11
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan
Menurut Penghasilan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

3. Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan

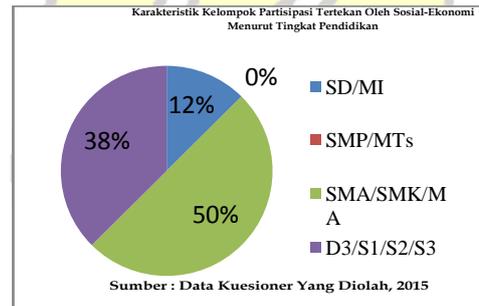
Gambar 4.9
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan
Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

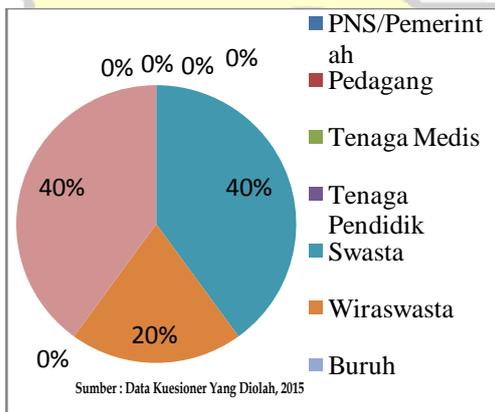
4. Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi

Gambar 4.12
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi
Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Gambar 4.10
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan
Menurut Jenis Pekerjaan



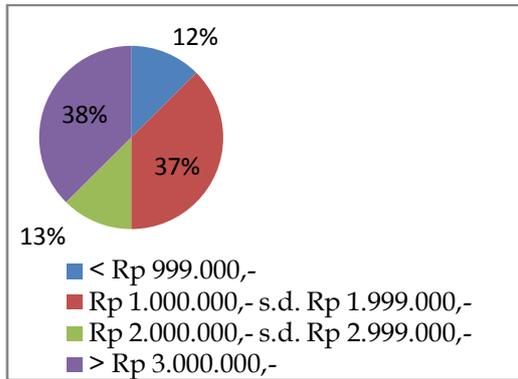
Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Gambar 4.13
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi
Menurut Jenis Pekerjaan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Gambar 4.14
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi Menurut Penghasilan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

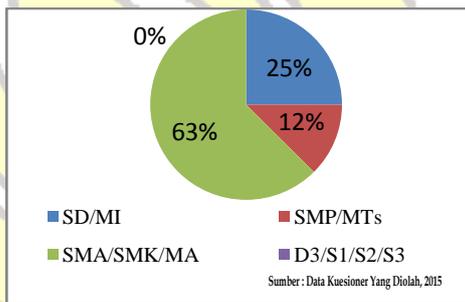
Gambar 4.17
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan Menurut Penghasilan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

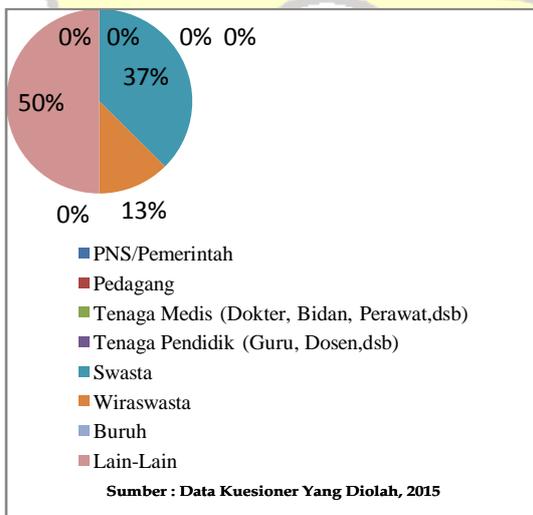
5. Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan

Gambar 4.15
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Gambar 4.16
Karakteristik Kelompok Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan Menurut Jenis Pekerjaan



Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah, 2015

Sesuai dengan hasil penelitian, menurut data responden pada tabel Data Responden dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut serta dalam pengurusan akta kelahiran lebih banyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 51 responden atau 51%. Sedangkan partisipasi yang diberikan oleh responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 49 responden atau sebesar 49%.

Sedangkan berdasarkan usia dapat diketahui bahwa partisipasi dalam pengurusan akta kelahiran terbanyak diberikan oleh responden yang berusia antara 18 – 34 tahun sebanyak 49 responden atau 49%. Selanjutnya sebanyak 44 responden atau 44% berusia 35–51 tahun, sebanyak 7 responden atau 7% berusia 52 - 68 tahun. Sedangkan usia < 17 tahun dan > 68 tahun tidak ada (0).

Selanjutnya menurut tingkat pendidikan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu sebanyak 56 responden atau 56%. Disusul sebanyak 25 responden atau 25% memiliki tingkat pendidikan D3/S1/S2/S3, sebanyak 12 responden atau 12% memiliki tingkat pendidikan SMP/MTs. Dan partisipasi terendah diberikan oleh responden yang memiliki pendidikan SD/MI yaitu sebanyak 7 responden atau 7%.

Berdasarkan pada jenis pekerjaan responden, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 46 responden atau 46%. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai PNS/Pemerintah sebanyak 6 responden atau 6%, selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pedagang dan tenaga medis (dokter, bidan, perawat, dsb) masing-masing sebanyak 1 responden atau masing-masing 1%. Sedangkan partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai tenaga pendidik (guru, dosen, dsb)

sebanyak 4 responden atau 4%. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja di luar pekerjaan yang tercantum dalam kuesioner atau lain-lain (Ibu Rumah Tangga, Teknisi, SPG/SPB) sebanyak 14 responden atau 14% dan partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai buruh tidak ada atau 0%.

Berdasarkan penghasilan responden per bulan, partisipasi tertinggi dilakukan oleh responden yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- yaitu sebanyak 33 responden atau 33%. Kemudian disusul oleh responden yang memiliki penghasilan > Rp 3.000.000,- yaitu sebanyak 32 responden atau 32%. Selanjutnya sebanyak 22 responden atau 22% berpenghasilan antara Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000,-. Dan partisipasi terendah diberikan oleh responden berpenghasilan < Rp 999.000,- sebanyak 13 responden atau 13%.

Berdasarkan pada lamanya tinggal di Kota Surabaya, partisipasi tertinggi dilakukan oleh responden yang tinggal di Kota Surabaya antar 16–30 tahun yaitu sebanyak 38 responden. Selanjutnya disusul oleh sebanyak 30 responden tinggal di Kota Surabaya selama < 15 tahun, responden yang tinggal di Kota Surabaya antara 31 – 45 tahun sebanyak 23 responden. Sedangkan partisipasi terendah dilakukan sebanyak 9 responden yang tinggal di Kota Surabaya > 45 tahun.

Merujuk pada hasil penelitian mengenai skor persentase pada setiap kategori tingkat kesukarelaan partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kelompok Partisipasi Spontan

Dari 100 responden terdapat 63 responden termasuk dalam kategori tingkat partisipasi spontan. Partisipasi spontan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran atas dasar kesadaran diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat telah ikut serta dalam pengurusan akta kelahiran mengingat pentingnya manfaat dan fungsi akta kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan yang paling penting.

Menurut tingkat pendidikan, partisipasi paling banyak diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu sebesar 51% atau 32 responden. Selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh responden dengantingkat pendidikan SD/MI sebesar 3% atau 2 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 13% atau 8 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan D3/S1/S2/S3 sebesar 33% atau 21 responden.

Menurut jenis pekerjaan, partisipasi paling banyak diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 48% atau 30 responden. Keikutsertaan yang diberikan oleh responden yang berprofesi sebagai PNS/Pemerintah sebesar 6% atau 4 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pedagang sebesar 1% atau 1 responden, dan tenaga medis (dokter, bidan, perawat, dsb) memperoleh skor sebesar 2% atau 1 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai tenaga pendidik (guru, dosen, dsb) sebesar 5% atau 3 responden. Responden yang bekerja sebagai wiraswasta memberikan partisipasinya sebesar 14% atau 9 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja selain yang tercantum dalam kuesioner atau lain-lain meliputi Ibu Rumah Tangga, SPG/SPB, Teknisi sebesar 24% atau 15 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai buruh memperoleh skor 0% atau tidak ada yang berpartisipasi.

Menurut penghasilan, partisipasi paling sedikit diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan < Rp 999.000,- yaitu sebesar 16% atau 10 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000,- sebesar 22% atau 14 responden. Partisipasi yang dilakukan responden yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- sebesar 27% atau 17 responden. Partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan > Rp 3.000.000,- yaitu sebesar 35% atau 22 responden.

2) Kategori Tingkat Partisipasi Terinduksi

Dari 100 responden terdapat 16 responden termasuk dalam kategori tingkat partisipasi terinduksi. Dalam kategori partisipasi terinduksi keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran atas dasar motivasi, saran atau pengaruh orang lain baik keluarga, teman, kerabat maupun informasi layanan masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran masih dipengaruhi oleh dorongan dari orang lain.

Menurut tingkat pendidikan, partisipasi paling banyak diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu sebesar 63% atau 10 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan

SD/MI sebesar 12% atau 2 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 19% atau 3 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan D3/S1/S2/S3 sebesar 6% atau 1 responden.

Menurut jenis pekerjaan, partisipasi paling banyak diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 44% atau 7 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja atau berprofesi sebagai PNS/Pemerintah sebesar 6% atau 1 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pedagang, tenaga medis (dokter, bidan, perawat, dsb), tenaga pendidik (guru, dosen, dsb) dan buruh memperoleh skor 0% atau tidak ada. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebesar 13% atau 2 responden. Partisipasi yang dilakukan oleh responden yang bekerja selain yang tercantum dalam kuesioner atau lain-lain meliputi Ibu Rumah Tangga, SPG/SPB, Teknisi sebesar 38% atau 6 responden.

Menurut penghasilan, partisipasi dilakukan paling sedikit diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan <Rp 999.000,- yaitu sebesar 12% atau 2 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000,- sebesar 19% atau 3 responden. Partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- sebesar 38% atau 6 responden. Selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan > Rp 3.000.000,- yaitu sebesar 31% atau 5 responden.

3) Kategori Tingkat Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan

Dari 100 responden terdapat 5 (lima) responden termasuk dalam kategori tingkat partisipasi tertekan oleh kebiasaan. Dalam kategori partisipasi tertekan oleh kebiasaan, keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran atas dasar adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat baik dalam bentuk norma maupun nilai di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran masih dipengaruhi oleh kebiasaan yang ada di masyarakat.

Menurut tingkat pendidikan secara keseluruhan partisipasi diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan akhir SMA/SMK/MA.

Partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan D3/S1/S2/S3 tidak ada atau memperoleh skor 0%.

Menurut jenis pekerjaan partisipasi terendah diberikan oleh responden yang bekerja sebagai wiraswasta dengan skor 20% atau 1 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta dan bekerja selain yang tercantum dalam kuesioner (Ibu Rumah, Teknisi, SPG/SPB) sama-sama memperoleh skor 40% atau masing-masing 2 responden. Dan responden yang bekerja sebagai PNS/Pemerintah, Pedagang, Tenaga Medis (Dokter, Bidan, Perawat, dsb), Tenaga Pendidik (Guru, Dosen, dsb) dan Buruh memperoleh skor 0% atau tidak ada yang berpartisipasi.

Menurut penghasilan partisipasi terendah diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan > Rp 3.000.000,- dengan skor 20% atau 1 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- dan penghasilan Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000,- sama-sama memperoleh skor 40% atau masing-masing 2 responden. Dan untuk responden yang berpenghasilan < Rp 999.000,- tidak ada yang berpartisipasi.

4) Kategori Tingkat Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi

Dari 100 responden terdapat 8 (delapan) responden termasuk dalam kategori tingkat partisipasi tertekan oleh sosial-ekonomi. Dalam kategori partisipasi tertekan oleh sosial-ekonomi, keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran atas dasar kondisi sosial di lingkungan masyarakat, hubungan dalam kehidupan sosial serta keadaan ekonomi yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian yang akan diterima jika ikut serta dalam pengurusan akta kelahiran.

Menurut tingkat pendidikan, partisipasi paling banyak diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu sebesar 50% atau 4 responden. Selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan SD/MI sebesar 12% atau 1 responden. Keikutsertaan yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 0% atau tidak ada. Dan partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan D3/S1/S2/S3 sebesar 38% atau 3 responden.

Menurut jenis pekerjaan partisipasi terbanyak diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu

sebesar 50% atau 4 responden. Sedangkan partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai PNS/Pemerintah sebanyak 12% atau 1 responden, partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai tenaga pendidik (Guru, Dosen, dsb) sebesar 12% atau 1 responden, dan partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja selain yang tercantum dalam kuesioner sama-sama memperoleh skor 13% atau 1 responden. Selanjutnya partisipasi yang dilakukan oleh responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebesar 13% atau 1 responden. Dan partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pedagang, tenaga medis (dokter, bidan, perawat, dsb) dan buruh sebesar 0% atau tidak ada yang berpartisipasi.

Menurut penghasilan partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- sebesar 37% atau 3 responden, partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan > Rp 3.000.000,- memperoleh skor 38% atau 3 responden. Begitu pula partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan < Rp 999.000,- sebesar 12% atau 1 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden yang berpenghasilan Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000,- juga sama-sama memperoleh skor 13% atau 1 responden.

5) Kategori Tingkat Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan

Dari 100 responden terdapat 8 (delapan) responden termasuk dalam kategori tingkat partisipasi tertekan oleh peraturan. Dalam kategori partisipasi tertekan oleh peraturan, keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran atas dasar ketakutan dan kekhawatiran masyarakat terhadap denda atau sanksi yang akan diberikan jika tidak mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran seperti denda yang akan diberikan jika terlambat dalam pengurusan akta kelahiran.

Menurut tingkat pendidikan, partisipasi paling banyak diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu sebesar 63% atau 5 responden. Selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan SD/MI sebesar 25% atau 2 responden. Partisipasi yang diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 12% atau 1 responden. Dan partisipasi yang diberikan

oleh responden dengan tingkat pendidikan D3/S1/S2/S3 sebesar 0% atau tidak ada.

Menurut jenis pekerjaan partisipasi terbanyak diberikan oleh responden yang bekerja selain yang tercantum dalam kuesioner (Ibu Rumah tangga, Teknis, SPG/SPB) yaitu sebesar 50% atau 4 responden. Selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai PNS/Pemerintah, Pedagang, Tenaga Medis (Dokter, Bidan, Perawat, dsb), Tenaga Pendidik (Guru, Dosen, dsb), dan buruh sebesar 0% atau tidak ada yang berpartisipasi. Sedangkan partisipasi yang diberikan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebesar 37% atau 3 responden, partisipasi yang diberikan oleh responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 1 responden atau 13% atau 1 responden.

Menurut penghasilan partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- sebesar 63% atau 5 responden. Selanjutnya partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000,- sebesar 25% atau 2 responden. Sedangkan partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan > Rp 3.000.000,- sebesar 13% atau 1 responden. Dan partisipasi yang diberikan oleh responden yang memiliki penghasilan < Rp 999.000,- sebesar 0% atau tidak ada yang berpartisipasi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan (Kajian Pada Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya)” maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Dusseldorp dalam Turindra (2013:25) yang membedakan adanya jenjang kesukarelaan partisipasi masyarakat yaitu partisipasi spontan, partisipasi terinduksi, partisipasi tertekan oleh kebiasaan, partisipasi tertekan oleh sosial-ekonomi, dan partisipasi tertekan oleh peraturan. Peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelompok Tingkat Partisipasi Spontan

Dari 100 responden terdapat sebanyak 63 responden atau 63% yang tergolong dalam kelompok tingkat partisipasi spontan. Partisipasi spontan

diberikan atas dasar kesadaran diri sendiri. Dalam memberikan partisipasi ditentukan oleh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan. Berdasarkan tingkat pendidikan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu sebesar 50,79% atau 32 responden. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 47,61% atau 30 responden. Selanjutnya berdasarkan jumlah penghasilan partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang berpenghasilan >Rp 3.000.000,- yaitu sebanyak 22 responden atau 34,92%.

Responden (masyarakat) yang mendominasi berperan serta dalam pengurusan akta kelahiran secara spontan atau atas dasar kesadaran diri sendiri diberikan oleh responden yang memiliki pendidikan SMA/SMK/MA. Sedangkan menurut jenis pekerjaan paling banyak didominasi oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta. Dan berdasarkan penghasilan, partisipasi didominasi oleh responden yang memiliki penghasilan > Rp 3.000.000,-

2. Kelompok Tingkat Partisipasi Terinduksi

Dari 100 responden terdapat sebanyak 16 responden atau 16% yang tergolong dalam kelompok tingkat partisipasi terinduksi. Partisipasi terinduksi diberikan karena adanya dorongan, motivasi, saran, dan pengaruh dari orang lain baik kerabat, keluarga, maupun teman. Berdasarkan pada tingkat pendidikan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu sebesar 62,5% atau 10 responden, dan partisipasi terendah diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan D3/S1/S2/S3 yaitu sebesar 6,25% atau 1 responden. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 43,75% atau 7 responden, dan partisipasi terendah diberikan oleh responden yang bekerja sebagai PNS/Pemerintah yaitu sebesar 6,25% atau 1 responden. Selanjutnya berdasarkan penghasilan partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- yaitu sebanyak 6 responden atau 37,5%, dan partisipasi terendah diberikan oleh responden yang

berpenghasilan < Rp 999.000,- yaitu sebesar 12,5% atau 2 responden.

Masyarakat yang ikut serta dalam pengurusan akta kelahiran secara terinduksi atau atas dasar dorongan dari orang lain berdasarkan tingkat pendidikan secara garis besar partisipasi didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA.

Sedangkan menurut jenis pekerjaan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta paling dominan atau paling banyak berperan serta (ikut serta) dalam pengurusan akta kelahiran. Dan berdasarkan penghasilan, partisipasi didominasi terbanyak diberikan oleh responden yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,-

3. Kelompok Tingkat Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan

Dari 100 responden terdapat sebanyak 5 responden atau 5% yang tergolong dalam kelompok tingkat partisipasi tertekan oleh kebiasaan. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan dilakukan atas kebiasaan yang ada di masyarakat baik dalam bentuk norma atau nilai yang ada di masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan, partisipasi secara keseluruhan diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu 5 responden.

Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta dan lain-lain yaitu sama-sama sebesar 40% atau masing-masing 2 responden, dan partisipasi terendah diberikan oleh responden yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebesar 20% atau 1 responden. Selanjutnya berdasarkan penghasilan partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- dan Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000, yaitu masing-masing sebanyak 2 responden atau masing-masing 40%.

Berdasarkan tingkat pendidikan secara garis besar partisipasi secara keseluruhan didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan SMA/SMK/MA. Sedangkan menurut jenis pekerjaan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta dan lain-lain (Ibu Rumah Tangga, Teknisi, SPG/SPB) paling dominan atau paling banyak berperan serta (ikut serta) dalam pengurusan akta kelahiran. Sedangkan menurut penghasilan, responden yang berpenghasilan Rp

1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- dan Rp 2.000.000,- s.d. Rp 2.999.000, paling dominan atau paling banyak berperan serta (ikut serta) dalam pengurusan akta kelahiran.

4. Kelompok Tingkat Partisipasi Tertekan Oleh Sosial-Ekonomi

Terdapat sebanyak 8 (delapan) responden atau 8% yang tergolong dalam kelompok tingkat partisipasi tertekan oleh sosial-ekonomi. Partisipasi tertekan oleh sosial-ekonomi partisipasi yang diberikan atas dasar keadaan sosial-ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar seperti keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan jika ikut serta dalam pengurusan akta kelahiran.

Berdasarkan tingkat pendidikan, partisipasi secara keseluruhan diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu 4 responden atau 50%. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 4 responden atau 50%. Selanjutnya berdasarkan penghasilan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- yaitu sebanyak 3 responden atau 37,5%.

Berdasarkan tingkat pendidikan secara garis besar partisipasi secara keseluruhan didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan SMA/SMK/MA. Sedangkan menurut jenis pekerjaan responden yang bekerja sebagai pegawai paling dominan atau paling banyak berperan serta (ikut serta) dalam pengurusan akta kelahiran. Sedangkan berdasarkan penghasilan, responden yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- yang paling dominan atau paling banyak berperan serta (ikut serta) dalam pengurusan akta kelahiran.

5. Kelompok Tingkat Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan

Terdapat sebanyak 8 (delapan) responden atau 8% yang tergolong dalam kelompok tingkat partisipasi tertekan oleh peraturan. Dalam hal ini partisipasi yang diberikan atas dasar peraturan atau ketakutan akan sanksi atau denda atau hukuman yang akan diterima jika tidak menaati peraturan yang berlaku. Berdasarkan tingkat pendidikan, partisipasi secara keseluruhan diberikan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA yaitu 5

responden atau 62,5%. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 3 responden atau 62,5%. Selanjutnya berdasarkan penghasilan, partisipasi tertinggi diberikan oleh responden yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- yaitu sebanyak 5 responden atau 62,5%.

Dengan demikian, masyarakat yang ikut serta dalam pengurusan akta kelahiran karena tertekan oleh kebiasaan yang ada di masyarakat atau pengaruh dari kebiasaan, berdasarkan tingkat pendidikan secara garis besar partisipasi secara keseluruhan didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA.

Sedangkan menurut jenis pekerjaan responden yang bekerja sebagai pegawai paling dominan atau paling banyak berperan serta (ikut serta) dalam pengurusan akta kelahiran. Sedangkan menurut penghasilan, responden yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.999.000,- yang paling dominan atau paling banyak berperan serta (ikut serta) dalam pengurusan akta kelahiran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah :

1. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
 - a. Agar tetap mempertahankan pelayanan primanya dalam melayani pengurusan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya karena dengan memberikan pelayanan yang prima, maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya.
 - b. Agar terus memberikan informasi atau inovasi terbaru dan sosialisasi kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan khususnya pengurusan akta kelahiran. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan baik melalui media massa atau datang langsung kepada masyarakat melalui Kelurahan dan Kecamatan agar masyarakat yang memiliki SDM kurang baik dapat lebih mudah dalam memahami informasi yang disampaikan. Seperti ketika ada syarat-syarat yang belum bisa dipenuhi masyarakat dalam

pengurusan akta kelahiran agar ditulis atau dijelaskan lebih detail atau lengkap agar masyarakat tidak merasa kebingungan dengan syarat tersebut sehingga masyarakat dapat segera memenuhi persyaratan yang kurang lengkap.

2. Untuk Masyarakat

- a. Agar tidak segan / tidak malu serta jangan takut untuk bertanya kepada petugas pelayanan jika masih merasa kebingungan atau kurang paham dengan informasi yang disampaikan dalam pengurusan akta kelahiran ataupun dokumen kependudukan lainnya.
- b. Agar tidak segan / tidak malu serta jangan takut untuk melapor atau menegur jika dalam pengurusan akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya dikenakan biaya administrasi yang melampaui batas (diluar biaya sebenarnya), pelayanan yang diberikan petugas maupun dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang : UMM Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Yogyakarta : PT.RINEKA CIPTA
- Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi. 2014. Unesa University Press
- Riduwan. 2010. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rusli, Said. 1995. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Cetakan 7 (Revisi). Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: CV.ALFABETA
- Sugiyono. 2010. *“Statistika Untuk Penelitian”*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : CV.ALFABETA
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**
- Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan**
- Jurnal**
- Septiana, Johan. *“Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak”*. Skripsi FISIP Universitas Sultan Ageng Titayasa Serang Banten. 2013
- Haryono. *“Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013
- Nurbarani, Fitriana Dewi. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”*. E-Journal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2014
- Cahyani, Indah. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Kepengurusan Akta Kelahiran di Kecamatan Panggung Rejo Kabupaten Pasuruan”*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. 2014
- Turindra, Azis. *“Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo”*. Fakultas Ilmu Pertanian. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
- Suciati. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati”*. Program Pasca Sarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro, Semarang. 2006

Azhari, Kurnia Ibnu. *“Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Dalam Program Meighbourhood Development (Studi Kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”*. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2011

Deviyanti, Dea. *“Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”*. Universitas Mulawarman, Balikpapan. 2013

Media Online

www.surabaya.go.id

www.dispendukcapilsurabaya.go.i



UNESA
Universitas Negeri Surabaya